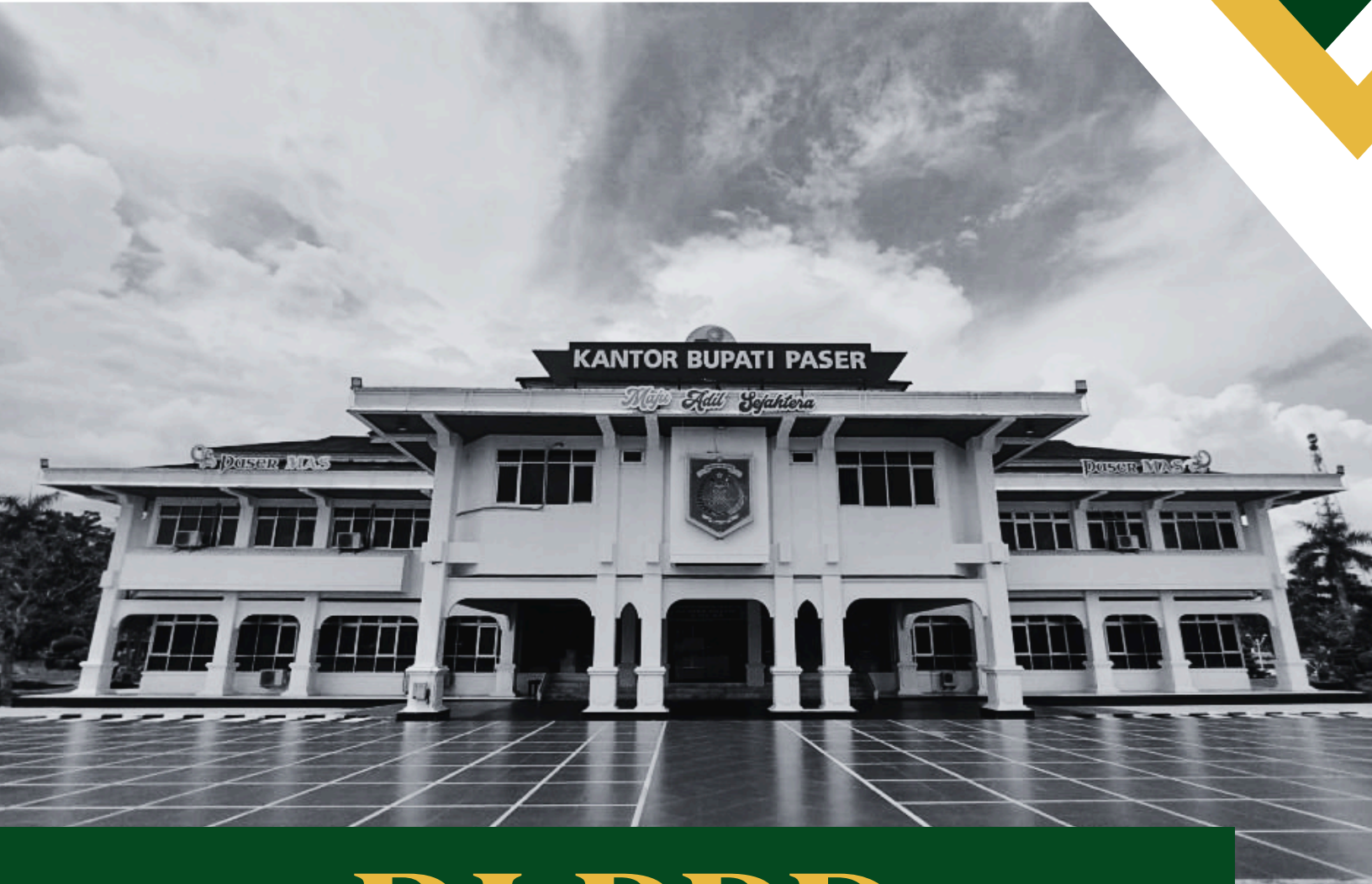




**PEMERINTAH  
KABUPATEN PASER**

**PaserMAS**  
*Olo Mantin Aso Buen Si Olo Nelo*



# RLPPD

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01 Tanah Grogot, Paser, Kallmantan Timur Kade Pos 76251  
Telp. (0543) 21150, Fax. (0543) 21079, Website <http://www.paserkab.go.id>

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN PASER TAHUN 2025

### 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian ini merupakan hasil sinergi antara program Pemerintah Daerah, Pusat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah tabel ringkasan capaian indikator makro Kabupaten Paser tahun 2025:

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Paser Tahun 2025**

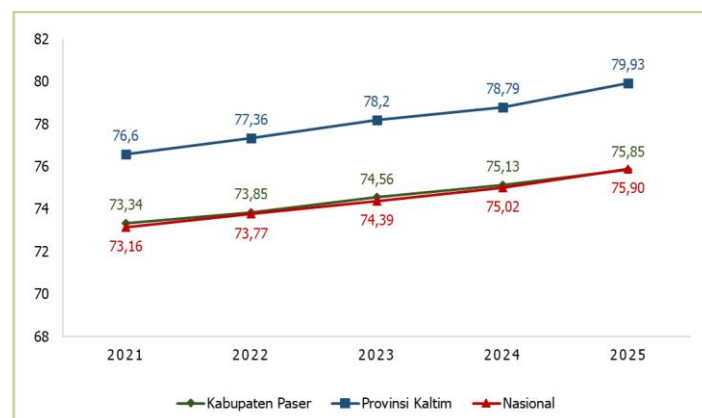
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,13%	75,85%	0,96
2	Angka Kemiskinan	8,63%	8,13%	-5,79
3	Angka Pengangguran	4,53%	4,62%	1,99
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,77%	3,61%	-4,24
5	Pendapatan per Kapita	193,17 Juta Rupiah	196,72 Juta Rupiah	1,84
6	Ketimpangan Pendapatan	0,271	0,273	0,74

Sumber Data: BPS Kabupaten Paser, 2026

#### 1) Indeks Pembangunan Manusia

IPM mengukur kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Paser Tahun 2021-2025**



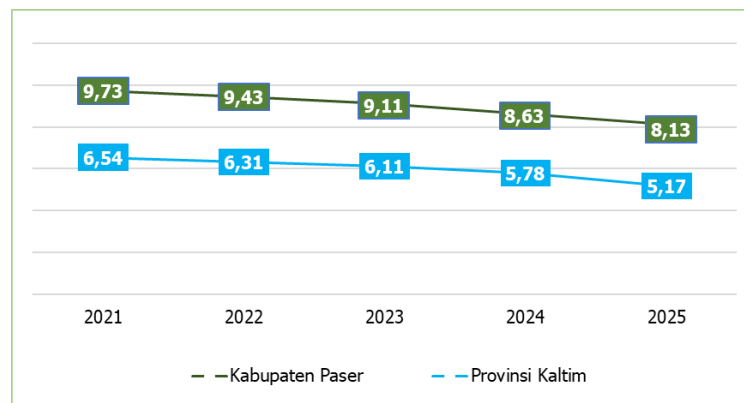
Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025, IPM Kabupaten Paser menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai 75,85% pada tahun 2025. Meskipun secara administratif masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, capaian ini secara konsisten melampaui rata-rata IPM Nasional, yang menandakan kualitas SDM di Kabupaten Paser cukup kompetitif.

## 2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2**  
**Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Paser (Persen),**  
**Tahun 2021-2025**



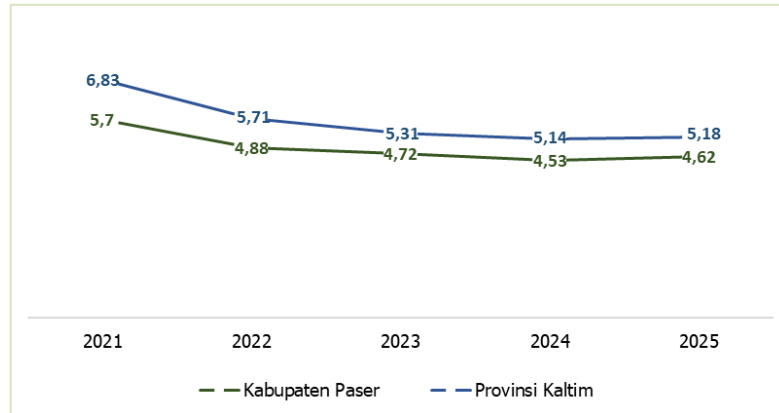
Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

Berdasarkan grafik di atas, Pemerintah Kabupaten Paser berhasil menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan turun menjadi 8,13% dari sebelumnya 8,63% (2024). Meski angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan proporsi kemiskinan tingkat provinsi, tren penurunan selama lima tahun terakhir menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan.

## 3) Angka Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3**  
**Perkembangan TPT Kabupaten Paser (Persen), Tahun 2021-2025**

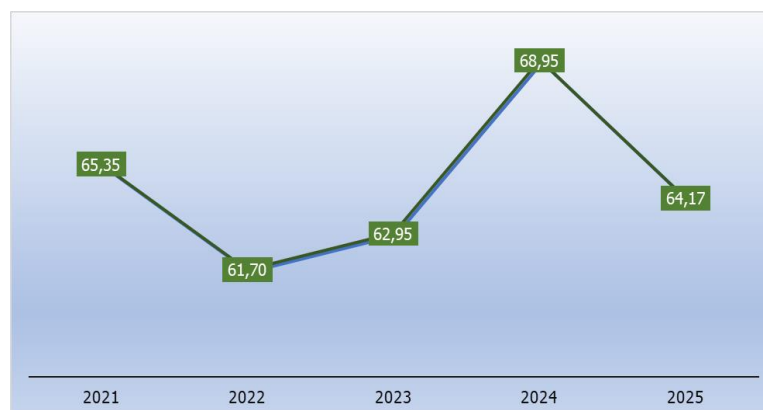


Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Paser pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,62%. Secara regional, persentase ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Kalimantan Timur.

Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi; setelah mencapai puncaknya di angka 68,95% pada tahun 2024, angka tersebut sedikit terkoreksi menjadi 64,17% pada tahun 2025. Perkembangan TPAK di Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4**  
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Paser (Persen), Tahun 2021-2025**

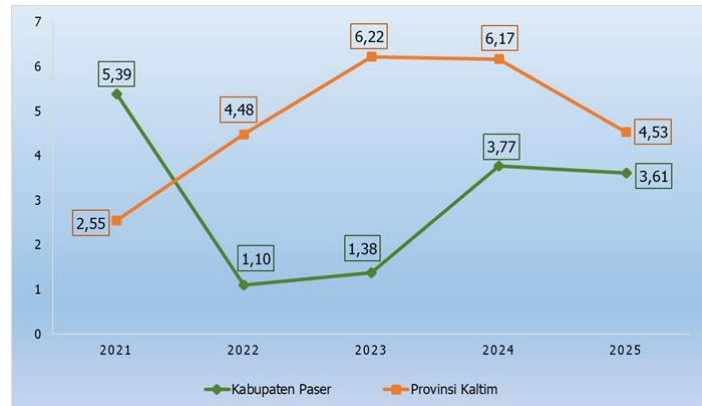


Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

#### 4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2025 dapat di lihat pada gambar berikut:

**Gambar 5**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser (Persen),**  
**Tahun 2021-2025**



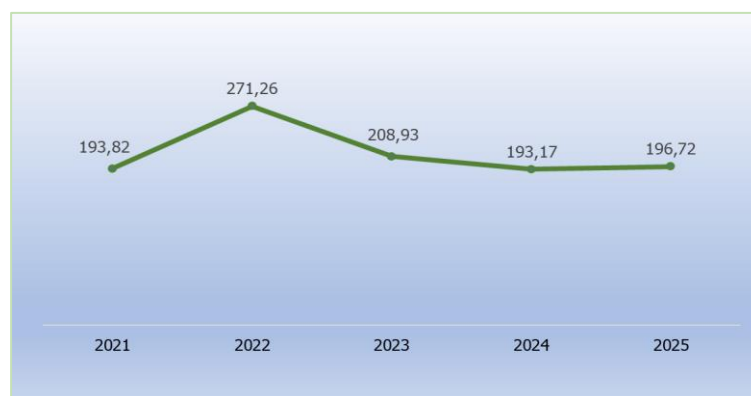
Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama periode 2021–2025 bersifat fluktuatif. Setelah sempat melambat tajam pada 2022 (1,38%), ekonomi kembali menguat di tahun 2023 (3,77%). Namun, pada tahun 2025 terjadi sedikit perlambatan menjadi 3,61%. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika sektor-sektor unggulan daerah yang sangat bergantung pada perubahan kondisi ekonomi global dan regional.

#### 5) Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita (PDRB per kapita) merupakan cerminan rata-rata kesejahteraan ekonomi penduduk. Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 6**  
**Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Paser (Juta Rupiah),**  
**Tahun 2021-2025**



Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

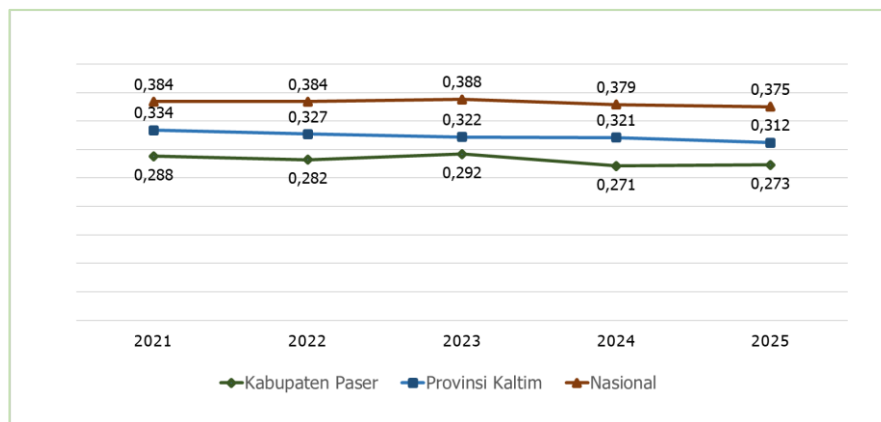
Dari grafik di atas memperlihatkan PDRB per kapita Kabupaten Paser periode lima tahun terakhir, pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Paser mencapai 193,82 juta rupiah dan naik sebesar 271,26 juta rupiah pada tahun 2022.

Namun, setelah sempat terkoreksi pada tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2025 Pendapatan per Kapita Kabupaten Paser kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan menjadi 196,72 juta rupiah.

## 6) Ketimpangan Pendapatan

Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perkembangan *Gini Ratio* di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021–2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 7**  
**Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Paser Tahun 2021-2025**



Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2026

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Paser relatif terjaga pada level rendah (pemerataan cukup baik). Pada tahun 2025, *Gini Ratio* berada pada angka 0,273. Meskipun terjadi kenaikan tipis dibanding tahun sebelumnya, angka ketimpangan di Kabupaten Paser jauh lebih rendah (lebih merata) dibandingkan dengan rata-rata *Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan di Kabupaten Paser terdistribusi secara lebih merata kepada masyarakat.

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya:

### 1) Urusan Pendidikan

#### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pendidikan**  
**di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini	100%
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	31,89%
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	68,02%
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	60,46%

**B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan**

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 689.664.989.139,40 atau mencapai 90,22% dari total pagu anggaran sebesar Rp 764.392.139.000,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>516.434.453.565,00</b>	<b>470.473.753.168,00</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	952.478.689,00	939.636.818,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	512.955.175.281,00	381.929.325.183,00
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	217.598.314,00	191.879.320,00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	446.409.286,00	436.535.120,00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.303.607.425,00	1.245.949.872,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.684.570,00	286.186.874,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.500.000,00	27.235.809,00
2.	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>243.542.857.695,00</b>	<b>216.916.677.634,40</b>
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	145.511.232.650,00	99.953.721.805,00
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	61.390.985.249,00	40.249.225.900,00
	c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34.900.735.361,00	31.683.177.925,00
	d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.739.904.435,00	1.520.270.517,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	<b>1.427.658.176,00</b>	<b>849.802.989,00</b>
	a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.033.158.480,00	603.057.920,00
	b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	394.499.696,00	254.109.934,00
4.	<b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>2.602.112.152,00</b>	<b>1.064.153.400,00</b>
	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2.602.112.152,00	1.064.153.400,00
5.	<b>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</b>	<b>43.632.000,00</b>	<b>23.348.000,00</b>
	a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-
	b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	43.632.000,00	23.348.000,00
6.	<b>Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra</b>	<b>341.425.412,00</b>	<b>337.253.948,00</b>
	a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	341.425.412,00	337.253.948,00

Sumber: BKAD, LRA per Program, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1.	Sulitnya mencapai target capaian SPM Pendidikan karena data mutu yang bersumber dari Rapor Pendidikan (terutama literasi, numerasi, dan iklim-iklim) hanya dinilai satu tahun sekali pada tahun sebelumnya. Akibatnya, nilai tersebut tidak langsung berubah di tahun berjalan untuk mencerminkan perkembangan terkini.	Untuk mencapai target ketercapaian SPM 100%, digunakan capaian output dari setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai tolok ukur keberhasilan.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser, 2026

## 2) Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu	0,12%
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16,86%
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) sesuai standar	100%

### B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 621.571.226.856,00 atau mencapai 94,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp 658.572.594.937,00 dengan program/kegiatan sebagai



berikut:

**Tabel 6**  
**Realisasi Belanja Urusan Kesehatan Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>434.720.877.224,00</b>	<b>426.255.821.573,00</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.042.835,00	135.869.090,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	218.108.594.817,00	206.499.989.191,00
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.696.000,00	48.132.358,00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.051.590,00	209.439.001,00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.313.289.681,00	4.842.038.855,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.994.066.363,00	13.285.857.812,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.299.727.378,00	1.092.894.992,00
	h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.548.967,00	481.099.380,00
	i. Peningkatan Pelayanan BLUD	194.095.859.593,00	199.660.500.894,00
2.	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>182.362.853.140,00</b>	<b>155.125.845.925,00</b>
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.393.334.977,00	73.898.994.737,00
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.723.256.163,00	81.070.721.710,00
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	196.262.000,00	125.236.278,00
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	30.893.200,00
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>28.236.052.453,00</b>	<b>27.251.952.328,00</b>
	a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	26.514.776.853,00	25.542.925.799,00
	b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.721.275.600,00	1.709.026.529,00
4.	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	<b>25.030.000,00</b>	<b>24.350.038,00</b>
	a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.030.000,00	24.350.038,00
5.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>13.227.782.120,00</b>	<b>12.913.256.992,00</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.428.000,00	46.048.400,00
	b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.500.000,00	70.986.800,00
	c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.090.854.120,00	12.796.221.792,00

Sumber: BKAD, LRA per Program, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Bidang/Aspek	Permasalahan	Solusi
1.	Sistem dan Metodologi	Belum tersedianya metode perhitungan sasaran target yang baku untuk implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Meningkatkan kualitas dokumen strategis (Renstra), sistem pengukuran kinerja, hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar berjalan sinergis.
2.	Partisipasi Masyarakat	Rendahnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan; cenderung bersifat pasif (menunggu sakit) dan menganggap kesehatan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.	Memberlakukan mekanisme kontrol dan meningkatkan kepedulian pimpinan terhadap kinerja jajaran di bawahnya untuk memastikan edukasi ke masyarakat berjalan maksimal.
3.	Kerja Sama Lintas Sektor	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program, termasuk kurangnya pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) swasta.	Melakukan upaya perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di berbagai faskes, termasuk mengintegrasikan keterlibatan faskes swasta.
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam memahami definisi operasional SPM, serta adanya rangkap jabatan	Mengidentifikasi kelemahan proses koordinasi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan

No	Bidang/Aspek	Permasalahan	Solusi
		(beban kerja ganda) pada pengelola program.	memperkuat fungsi pemantauan setiap indikator kinerja secara triwulan.
5.	Teknologi dan Pelaporan	Terhambatnya input data pelayanan (hipertensi, tuberkulosis, HIV) akibat aplikasi yang sering mengalami galat (error) dan ketidakstabilan sinyal jaringan.	Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan langkah solutif yang cepat terkoreksi.

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Paser, 2026

### 3) Urusan Pekerjaan Umum

#### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	34,99%
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	47,36%
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	87,36%
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,01%
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	6,86%
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100%
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/kota	100%
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	23,71%
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100%

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 1.098.423.298.326,00 atau mencapai 92,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.188.163.480.494,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.020.510.028,00</b>	<b>36.679.040.434,00</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.375.673,00	103.951.714,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.805.877.031,00	16.588.613.571,00
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.294.000,00	33.866.600,00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.050.257,00	57.019.808,00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.513.628,00	363.854.611,00
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	880.000.000,00	861.147.500,00
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000.000,00	4.145.903.732,00
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.139.399.439,00	14.524.682.898,00
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>129.087.706.289,00</b>	<b>123.742.118.957,00</b>
	a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.445.426.116,00	30.305.520.151,00
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.642.280.173,00	93.436.598.806,00
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>91.928.814.816,00</b>	<b>86.011.938.833,00</b>
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	91.928.814.816,00	86.011.938.833,00



No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>30.471.566.806,00</b>	<b>28.078.815.846,00</b>
	a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	30.471.566.806,00	28.078.815.846,00
5.	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>8.627.451.896,00</b>	<b>8.249.327.594,00</b>
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.627.451.896,00	8.249.327.594,00
6.	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>41.620.893.490,00</b>	<b>37.548.307.237,00</b>
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.620.893.490,00	37.548.307.237,00
7.	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>260.201.612.744,00</b>	<b>243.920.785.931,00</b>
	a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	260.201.612.744,00	243.920.785.931,00
8.	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>580.363.193.936,00</b>	<b>529.406.673.834,00</b>
	a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	580.363.193.936,00	529.406.673.834,00
9.	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>2.746.087.289,00</b>	<b>2.708.987.903,00</b>
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.441.826.309,00	1.417.273.679,00
	b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	396.006.660,00	392.112.788,00
	c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	908.254.320,00	899.601.436,00
10.	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>2.095.643.200,00</b>	<b>2.077.301.757,00</b>
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	830.600.500,00	826.388.259,00
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.160.421.700,00	1.153.181.460,00
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	104.621.000,00	97.732.038,00

Sumber : BKAD, LRA per Program, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Permasalahan dan Solusi**

Jenis Pelayanan	Tahapan	Permasalahan	Solusi
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Pengumpulan Data	Pendataan SPAM perdesaan belum selesai dan belum terpusat (dikelola mandiri oleh KPSPAM Desa).	Koordinasi intensif dengan Pemerintah Desa dan peningkatan pendampingan teknis sesuai anggaran.
	Penghitungan Kebutuhan	Data dasar kapasitas air baku dan profil ekonomi MBR/non-MBR belum akurat/lengkap.	Melakukan pendataan menyeluruh agar penghitungan kebutuhan lebih tepat sasaran.
	Penyusunan Rencana	Keterbatasan anggaran menghambat pemenuhan target sambungan rumah (SR).	Prioritas layanan bagi MBR dan optimalisasi dana pusat (APBN) melalui program HAMP/PAMSIMAS.
	Pelaksanaan	Perubahan target akibat ketidaklolosan calon penerima dan sulitnya lokasi pekerjaan.	Penyesuaian metode kerja di lapangan untuk memacu progres fisik di lokasi yang sulit.
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penghitungan Kebutuhan	Data air limbah layak/aman dan kepemilikan jamban sesuai SNI belum maksimal.	Pendataan menyeluruh kondisi sanitasi untuk optimalisasi pemenuhan SPAL.
	Penyusunan Rencana	Tingginya kebutuhan akses limbah aman tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran.	Penentuan prioritas penerima SPALD-S Skala Individu diutamakan bagi MBR.
	Pelaksanaan	Banyak tangki septik belum standar SNI dan belum pernah dilakukan penyedotan.	Sosialisasi sanitasi aman dan penerapan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser, 2026

#### 4) Urusan Perumahan

##### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Perumahan**  
**di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	48,11%
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	6,90%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%

**B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan**

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 311.894.571.289,00 atau mencapai 96,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp 322.792.481.968,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Realisasi Belanja Urusan Perumahan Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.651.853.457,00</b>	<b>10.473.147.198,00</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.095.195,00	135.456.148,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.574.135.560,00	9.436.275.158,00
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.549.827,00	749.195.964,00
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.522.500,00	7.157.648,00
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.550.375,00	145.062.280,00
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>2.479.664.131,00</b>	<b>2.178.821.419,00</b>
	a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.425.000,00	349.163.927,00
	b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.033.321.631,00	1.737.051.769,00
	c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	95.917.500,00	92.605.723,00
<b>3.</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>7.975.576.590,00</b>	<b>7.811.840.886,00</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	433.195.000,00	409.825.892,00
	b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.542.381.590,00	7.402.014.994,00
<b>4.</b>	<b>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>9.829.163.202,00</b>	<b>9.755.728.197,00</b>
	a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9.829.163.202,00	9.755.728.197,00
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>289.856.224.588,00</b>	<b>281.675.033.589,00</b>
	a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	289.856.224.588,00	281.675.033.589,00

Sumber : BKAD, LRA per Program, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1.	Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam memahami regulasi dan teknis SPM.	Dilakukan koordinasi antar instansi terkait dan sosialisasi hingga tingkat Kelurahan/Desa mengenai kriteria hunian sesuai petunjuk teknis.
2.	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanganan bencana.	Sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai kriteria rumah kategori bencana dan mendorong kemandirian (swadaya) masyarakat.
3.	Status hukum lahan rumah yang terkena bencana belum memiliki kejelasan.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan daerah rawan bencana dan status lahan yang terdampak.
4.	Ketidaksesuaian data, di mana banyak kejadian banjir tidak termasuk dalam cakupan penanganan SPM perumahan.	Melakukan <i>update</i> data <i>baseline</i> secara berkala untuk memantau perubahan kondisi rumah masyarakat (baik hasil swadaya maupun rehabilitasi).
5.	Belum ada program relokasi dari pemerintah, sehingga anggaran hanya tersedia untuk identifikasi dan pendataan.	Penetapan daerah rawan atau potensi bencana melalui koordinasi instansi agar perencanaan program dan anggaran masa depan lebih tepat sasaran.
6.	Kesulitan menetapkan target tahunan untuk indikator kejadian bencana yang bersifat tidak	Melakukan identifikasi dini terhadap daerah yang memiliki potensi menjadi daerah bencana untuk

No	Permasalahan	Solusi
	terduga.	pemetaan target yang lebih akurat.

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Paser, 2026

## 5) Urusan Trantibum Linmas

### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,83%

### B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 57.144.067.623,00 atau mencapai 87,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp 65.119.226.770,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.260.121.923,00</b>	<b>44.662.276.105,00</b>
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	710.661.390,00	709.437.397,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.980.747.044,00	32.988.003.557,00
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.242.833.752,00	8.915.775.374,00



No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.833.609,00	256.048.665,00
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.262.960.724,00	1.242.488.202,00
<b>2.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>5.173.627.788,00</b>	<b>4.066.425.299,00</b>
	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.062.789.339,00	3.036.241.582,00
	b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	91.270.050,00	88.031.885,00
	c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	721.223.399,00	645.728.032,00
	d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	298.345.000,00	296.423.800,00
<b>3.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.951.659.113,00</b>	<b>2.861.146.359,00</b>
	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	183.967.250,00	180.069.507,00
	b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.013.364.643,00	993.685.735,00
	c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.241.820.141,00	1.209.817.555,00
	d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	512.507.079,00	477.573.562,00
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.733.817.946,00</b>	<b>5.554.219.860,00</b>
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.003.733.269,00	3.827.464.658,00
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.663.756.677,00	1.660.834.202,00
	c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	66.328.000,00	65.921.000,00

Sumber: BKAD, LRA per Urusan, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Permasalahan	Solusi
<b>Sub Urusan Trantibum</b>		
1.	Rasio Personel Tidak Ideal: Jumlah 154 ASN dianggap belum sebanding dengan beban tugas pelayanan.	Melakukan pemetaan beban kerja, penataan penugasan berbasis prioritas wilayah, serta mengusulkan penambahan personel atau

No	Permasalahan	Solusi
		optimalisasi tenaga non-ASN/PPPK.
2.	Akses Pelatihan Terbatas: Sulitnya akses terhadap pelatihan dasar dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.	Menginisiasi pelatihan internal (in-house training), memanfaatkan pelatihan daring, serta menjalin kerja sama dengan BPSDM, Satpol PP provinsi, dan lembaga terkait.
3.	Koordinasi Antar Instansi: Perlu peningkatan koordinasi dengan instansi daerah maupun vertikal untuk layanan yang lebih baik.	Memperkuat forum koordinasi lintas sektor melalui MoU/PKS, rapat rutin, dan pembentukan tim terpadu penanganan ketertiban umum.
4.	Anggaran Terbatas: Minimnya anggaran untuk pengawasan dan penegakan Perda serta Perkada.	Mengusulkan peningkatan anggaran berbasis kinerja dan risiko, serta memprioritaskan kegiatan pengawasan yang berdampak langsung pada ketertiban umum.
5.	Sarana Prasarana Minim: Keterbatasan sarana kantor (bangunan) dan perlengkapan kerja untuk pelayanan.	Mengusulkan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap melalui perencanaan kebutuhan yang jelas, pemanfaatan aset daerah, dan optimalisasi fasilitas yang ada.
<b>Sub Urusan Bencana Daerah</b>		
1.	Sebagian pegawai belum memiliki sertifikasi atau pelatihan teknis kebencanaan (manajemen darurat, logistik, dll).	Menyusun program peningkatan kapasitas SDM secara berjenjang.
2.	BPBD sangat bergantung pada bantuan BNPB atau APBN untuk logistik, sarpras, dan latihan.	Mengoptimalkan APBD untuk mendukung kemandirian logistik dan pelatihan.
3.	Keterbatasan akses ke daerah terdampak bencana.	Melakukan pemetaan risiko dan jalur evakuasi menggunakan teknologi GIS serta data BMKG.
4.	Minimnya anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.	Menyusun skala prioritas pada kegiatan biaya rendah namun dampak besar (penyuluhan, simulasi sekolah, dan sistem peringatan dini).
5.	Minimnya sarana prasarana (sarpras) dalam penyelamatan dan evakuasi korban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi sarpras &amp; sharing resources dengan TNI/Polri, PMI, dan Basarnas.</li> <li>b. Pengadaan bertahap sesuai APBD.</li> <li>c. Pemanfaatan inovasi lokal (perahu tradisional/tandu rakitan).</li> </ol>
<b>Sub Urusan Pemadam Kebakaran</b>		
1.	Keterbatasan Anggaran: Menghambat kemampuan pengumpulan data yang akurat dan terkini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan prioritas pengeluaran yang lebih tepat sasaran.</li> <li>b. Mencari sumber dana alternatif (Hibah, Bantuan Pemerintah Pusat, Dana DBH-DR, atau kerjasama swasta).</li> </ol>

No	Permasalahan	Solusi
2.	Tingginya Ego Sektoral: Rendahnya komitmen dan kerja sama antar bidang pengampu SPM yang menghambat efektivitas pengumpulan data.	a. Meningkatkan kolaborasi melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. b. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya data dan kontribusi tiap bidang.
3.	Perencanaan Masa Depan: Menghindari pengulangan kendala di tahun-tahun mendatang.	Membuat perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan berbagai aspek (sumber pembiayaan, kemampuan pembiayaan, dan sistem pengumpulan data).

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Paser, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Paser dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Paser, 2026

## 6) Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan social yang diperoleh oleh Kabupaten Paser pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Urusan Sosial di Kabupaten Paser Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	92,68%

### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Paser Tahun 2025 sebesar Rp 12.244.213.838,00 atau mencapai 87,10% dari total pagu anggaran Rp 14.057.996.590,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:



**Tabel 18**  
**Realisasi Belanja Urusan Sosial Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.377.800.470,00</b>	<b>8.176.549.029,00</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.518.798,00	201.451.542,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.268.130.829,00	7.132.567.930,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.416.153,00	399.343.944,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.667.297,00	266.627.615,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.817.000,00	63.501.308,00
2.	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>337.801.020,00</b>	<b>287.898.073,00</b>
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	137.241.370,00	133.535.291,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.943.200,00	30.868.975,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	169.616.450,00	123.493.807,00
3.	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>2.347.836.927,00</b>	<b>2.154.998.480,00</b>
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.483.461.576,00	1.384.670.417,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	116.348.920,00	98.322.385,00
4.	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>941.749.573,00</b>	<b>716.862.941,00</b>
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	97.088.300,00	96.503.741,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	844.661.273,00	620.359.200,00
5.	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>761.327.071,00</b>	<b>631.704.268,00</b>
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	556.078.032,00	472.469.868,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	205.249.039,00	159.234.400,00
6.	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>291.481.529,00</b>	<b>276.201.047,00</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	291.481.529,00	276.201.047,00

Sumber: BKAD, LRA per Urusan, per 31 Desember 2025 (Unaudited)

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Bidang Permasalahan	Permasalahan	Solusi
1.	SDM Pelayanan Sosial	Kurangnya pekerja sosial dan penyuluh untuk menangani disabilitas, anak, dan lansia terlantar.	Mengusulkan rekrutmen tenaga baru melalui jalur ASN, PPPK, atau tenaga kontrak daerah.
2.	Sarana dan Prasarana	Minimnya kendaraan roda 4 untuk pengantaran bantuan korban bencana alam dan sosial.	Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional melalui perencanaan anggaran daerah skala prioritas.
3.	Manajemen Bencana	Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang penanganan bencana alam dan sosial.	Meningkatkan kompetensi aparatur dan relawan melalui pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
4.	Data dan Koordinasi	Koordinasi dengan desa kurang maksimal terkait pendataan warga terlantar dan gepeng.	Memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa melalui rapat koordinasi dan sosialisasi berkala.
5.	Sistem Pengadaan	Hambatan proses pengadaan akibat perubahan aplikasi SIRUP dari versi 5 ke versi 6.	Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan penyesuaian proses.

Sumber: Dinas Sosial Kab. Paser, 2026

### **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### **a) Hasil EPPD Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Paser berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,7858 dan status kinerja Sedang.

#### **b) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.A/LHP/XIX.SMD/5/2025 Tanggal 20 Mei 2025, Kabupaten Paser berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

### **4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

(*unaudited*) Tahun 2025, bahwa realisasi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 3.945.923.101.733,29 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 mencapai Rp 4.509.163.101.820,02.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025**

Kode Rek.	Jenis Pendapatan dan Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.366.153.156.172,00</b>	<b>3.945.923.101.733,29</b>	<b>90,37</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	363.678.300.475,00	401.008.487.625,29	110,26
4.2	Pendapatan Transfer	3.931.049.365.800,00	3.473.489.124.293,00	88,36
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	99,99
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.937.617.900.000,00</b>	<b>4.509.163.101.820,02</b>	<b>91,32</b>
5.1	Belanja Operasi	2.920.025.197.873,29	2.674.085.386.448,03	91,58
5.2	Belanja Modal	1.557.808.299.426,71	1.406.248.325.017,99	90,27
5.3	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	3.031.184.837,00	30,31
5.4	Belanja Transfer	449.784.402.700,00	425.798.205.517,00	94,67
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1	Penerimaan Daerah	586.464.743.828,00	586.464.743.828,25	100,00
6.2	Pengeluaran Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>571.464.743.828,00</b>	<b>571.464.718.099,25</b>	<b>99,99</b>

Sumber: BKAD, LRA per 31 Desember 2025 (*Unaudited*)

## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Paser memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Inovasi Daerah Kabupaten Paser**

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	IKP (Indeks Kualitas Perencanaan)	Sebuah sistem yang digunakan untuk memudahkan Proses pengukuran indeks dihimpun dari realisasi kinerja dan dokumentatif proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan (proses bisnis Bappedalitbang Kab. Paser).



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		KOLABORASI KERJA BERBASIS GOOGLE WORKSPACE (Kober Gowu)	Inovasi atau reka baru yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki proses kerja di Bidang Litbang Bappedalitbang agar terjadi peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi kerja berbasis google workspace ini memanfaatkan layanan aplikasi yang disediakan oleh google.
		Sistem Fasilitasi pelaksanaan Inovasi Daerah (SIFIDA)	Sistem yang dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi inovasi daerah secara terintegrasi dan terstruktur. SIFIDA berfungsi sebagai sarana koordinasi dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dalam mengusulkan, mendokumentasikan, memantau, serta melaporkan pelaksanaan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Mekanisme Integrasi Ekonomi Biru Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser	MIE BIRU adalah sebuah aksi perubahan mengintegrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan berbasis kelautan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser.
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Strategi Peningkatan Literasi Dan Numerasi Pada Guru SD di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser	Strategi peningkatan kompetensi guru dalam memahami literasi dan numerasi yaitu dengan melakukan bimbingan teknis bagi guru SD kelas V dengan pola <i>in – on – in</i> . Bimbingan teknis (bimtek) <i>in – 1</i> ; guru-guru akan mendapatkan materi tentang strategi peningkatan literasi dan numerasi. Setelah bimtek, guru-guru melakukan aksi nyata peningkatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan masing-masing ( <i>on</i> ) Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi Bimbingan teknis ke-2 ( <i>In-2</i> ) guru-guru melakukan presentasi tentang hasil penerapan strategi peningkatan literasi dan numerasi. Adanya panduan kegiatan literasi dan numerasi untuk jenjang sekolah dasar.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Peningkatan hasil prestasi siswa pada pembelajaran seni tari dengan model “Toserba Micin”	Inovasi pembelajaran ini merupakan pengembangan yang didesain untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa dengan model “Toserba Micin” agar siswa tidak memiliki pemikiran bahwa tugas keterampilan dilakukan sekedar saja, hanya demi mendapatkan nilai, yang mengakibatkan motivasi belajar dan hasil belajar belum maksimal. Metode yang dikembangkan adalah mengajak siswa melakukan pengamatan bersama, menanya, meniru, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengemukakan gagasan, mengkreasikan hasil contoh gerak dasar, dan mempertanyakan hasil latihan didepan kelas.
		Final Project II	“Pemanfaatan Daun Kering Dan Air Leri Menjadi SMART Kompos Organik Di SMP Negeri 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser”
		Pembentukan Kader dan Duta Literasi	Kader dan Duta Literasi SMP Negeri 2 Tanah Grogot menghasilkan siswa/i yang memiliki keterampilan literasi yang baik sehingga siswa/i memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan dan mampu menyaring informasi yang benar.
		INOVASI DAERAH PENCIPTAAN KARYA TARI “PASER MAS (MAJU ADIL SEJAHTERA)”	Inovasi berupa karya tari “Paser Mas” yang mencakup beberapa aspek yang Relevan : Gerakan Tari yang Baru Pesan atau Makna yang Lebih Mendalam, Desain Kostum dan Musik yang Menarik dan Pertunjukan yang Berbeda dan Dinamis:
		Inovasi Panen Hasil Belajar SMP Negeri 2 Tanah Grogot	Inovasi sebuah ajang pelaksanaan seluruh hasil panen belajar dipamerkan dan pentas seni yang merupakan Upaya peningkatan mutu pendidikan
		Inovasi KOPPLING (Komunitas Pelajar Peduli Lingkungan) SMP Negeri 2 Tanah	Inovasi pembentukan Komunitas pelajar peduli lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melalui



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Grogot	pembentukan karakter yang dimulai sejak usia dini.
		Inovasi Pagi Ceria Pelajar Pancasila SMP Negeri 2 Tanah Grogot.	Inovasi berupa Kegiatan pembiasaan adalah sebagai pendukung terciptanya budaya positif peserta didik. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan pembiasaan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
		OPTIMALISASI KURIKULUM DI SEKOLAH PESISIR	Inovasi penerapan kurikulum di sekolah yang memuat karakteristik satuan pendidikan sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler serta ekstrakurikuler.
		PROGRAM LITENUM (LITERASI DAN NUMERASI)	Inovasi pembelajaran yang memuat Literasi dan Numerasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler serta ekstrakurikuler.
		Pemanfaatan Game-Based Learning Dalam Menunjang Pembelajaran Kurikulum Merdeka Menuju Paser MAS Dijaman Era Digital	Inovasi yang memanfaatkan metode game-based learning Kahoot! Dalam pembelajaran sehingga meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar
		Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Pembuatan Alat Bantu Visual Pengajaran Yang Lebih Menarik	Pemanfaatan GenAI yang digunakan VidnozAI merupakan video generator berbasis AI daring yang menyediakan beragam video untuk bisnis, media sosial, hiburan, dan sebagainya, menggunakan 900+ tempate video, 800+ avatars realistik dan aneka materi pembuatan video dengan ratusan skenario berbeda, untuk membuat video yang diinginkan dengan cepat (Vidnoz, n.d.). Selain itu, digunakan pula ElevenLabs yang merupakan audio generator berbasis AI daring yang mengembangkan model audio AI yang menghasilkan ucapan, suara,



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dan efek suara yang realistis, serbaguna, dan sadar kontekstual di 32 bahasa (elevenlabs.io, n.d.).
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pera Masak Patin (Peran Aktif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mendukung Pelayanan terpadu (Isbat Nikah)	terobosan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil masyarakat melalui optimalisasi peran Tim Penggerak PKK dalam mendukung pelayanan terpadu Isbat Nikah. Program ini hadir sebagai solusi atas masih adanya pasangan suami istri yang belum memiliki legalitas pernikahan secara administrasi negara, sehingga berdampak pada kesulitan pengurusan dokumen kependudukan dan akses pelayanan publik. Melalui inovasi ini, TP PKK berperan aktif dalam melakukan pendataan, sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas perkawinan. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama instansi terkait seperti Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk pelayanan terpadu Isbat Nikah yang terintegrasi dengan penerbitan dokumen kependudukan.
		Sakinah Kita Layanan Three In One	Inovasi atau terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang memungkinkan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akta Kelahiran secara bersamaan dalam satu kali pengajuan. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian kepada masyarakat, khususnya bagi orang tua yang baru memiliki bayi.
		E. BUEN Buka Layanan Baru	E-BUEN buka layanan baru merupakan pengembangan dari layanan berbasis web menjadi aplikasi Android dengan 13 fitur layanan administrasi kependudukan. Inovasi ini terintegrasi dengan aplikasi ALADIN (Aplikasi Layanan Antar Dokumen Administrasi Kependudukan) yang digunakan oleh driver untuk mengantarkan dokumen langsung ke alamat



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pemohon, lengkap dengan informasi tarif dan lokasi.
		Peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran melalui Peran Bidan Desa dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Paser	Inovasi atau terobosan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui optimalisasi peran bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat. Melalui inovasi ini, masyarakat cukup berkoordinasi dengan bidan desa saat proses persalinan atau setelah kelahiran bayi untuk mengurus dokumen kependudukan. Bidan desa berperan membantu pengumpulan dan pengajuan persyaratan secara terintegrasi kepada Disdukcapil, sehingga penerbitan dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Dokumen yang diterbitkan tidak hanya akta kelahiran, tetapi juga Kartu Keluarga (KK) terbaru serta Kartu Identitas Anak (KIA).
4.	Dinas Kesehatan	PTM Minggu	DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) di hari minggu
		Teledentistry Berorientasi Pelayanan (Tedy Ber)	Program layanan konsultasi, pendaftaran dan pengaduan online poli gigi dan Mulut
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Informasi Penjagaan Surat Ijin Praktek	Inovasi Sistem Informasi Penjagaan (SIP) atau SIGAP dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan sistem digital yang terintegrasi dalam pengelolaan jadwal penjagaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem penjagaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap jadwal penjagaan yang telah ditetapkan.
		Penguatan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Paser melalui Sistem Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terintegrasi (PASER IDAMAN)	Inovasi ini langsung menangani inti masalah, yaitu kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Selain meningkatkan keterampilan praktis tenaga kesehatan dalam kondisi
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima	Cakram Defedendency and fall risk	Inovasi berupa sebuah cakram untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam memantau risiko



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Sebay		jatuh, dan tingkat ketergantungan pasien terhadap tenaga kesehatan
		Kabari	Aplikasi sebagai Model Promosi Kesehatan Digital Untuk Meningkatkan Kompetensi Deteksi Dini Kehamilan Beresiko
		Papan Komunikasi	Inovasi berupa alat untuk memudahkan komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan/terbatas dalam berkomunikasi. Metode ini digunakan untuk mempermudah pasien dalam berkomunikasi menggunakan gambar, huruf dan angka yang dibuat dengan menarik dan sederhana agar mudah dipahami
		Tele Citra Radiologi RSUD Panglima Sebay (Tetra Baya)	Inovasi yang digunakan untuk memantau hasil radiologi secara real time sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam merawat Pasien
		Pasra Maya	PASRA MAYA (Perawatan Atraumatik untuk Senyum Riang Anak di Panglima Sebay merupakan Metode yang dilakukan untuk mengurangi nyeri dan trauma pada pasien anak adalah dengan tehnik rdistraksi visual dengan memberikan balon yang terbuat dari sarung tangan disposibel.
		Sistem Elektronik Rekam Medis Integratif "SI ERAI"	Sistem informasi yang dirancang sebagai sarana merekam semua aktifitas yang dilakukan pada pasien, semua data pasien disimpan dalam sistem yang terintegrasi dengan semua layanan rumah sakit
		Sistem Pelayanan Pengantaran Obat Tanpa Antri Ke Rumah Pasien (SIMPATI)	Inovasi layanan pengantaran obat SIMPATI (Sistem Pelayanan Pengantaran Obat Tanpa Antri Ke Rumah Pasien) dalam skala terbatas dengan ketentuan yang diberlakukan. Ketentuan yang dimaksud antara lain (1) resep masuk di SIMRS Farmasi antara pukul 10.00 hingga 14.00 WITA, dan (2) rumah pasien berada di wilayah Kelurahan Tanah Grogot atau dalam radius sekitar 5 km dari rumah sakit.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Panglima Sebaya	Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana merupakan suatu terobosan inovasi perencanaan untuk mengatasi permasalahan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana oleh unit/instalasi yang tidak terintegrasi, tidak tepat waktu dan masih menggunakan kertas. Dengan adanya aplikasi maka pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Panglima Sebaya diharapkan menjadi lebih optimal.
		Sistem Informasi Asuhan Keperawatan	inovasi digitalisasi layanan asuhan keperawatan dimana yang biasanya dibuat oleh tenaga keperawatan secara manual mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi ke pasien, kini bisa dilakukan dengan online, dengan terobosan inovasi sistem asuhan keperawatan ini akan mempermudah mengakses asuhan keperawatan, mempercepat pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien karena mudah di jangkau, mengurangi resiko kesalahan dalam penulisan yang akan berimbas pada praktik keperawatan, meningkatkan kualitas dokumentasi yang baik dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.
		Optimalisasi Pengelolaan Barang Melalui Sistem Informasi Persediaan Barang Terintegrasi	Inovasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Melalui Sistem Informasi Persediaan Barang Terintegrasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan persediaan barang milik daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan kebutuhan, pencatatan penerimaan, distribusi, mutasi, hingga pelaporan persediaan barang dalam satu platform digital yang terhubung dengan SIMRS
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Ecoprint dan Pewarnaan Alam Tanaman Asli	Inovasi Ecoprint merupakan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Kabupaten Paser	<p>sekitar Tahura Lati Petangis melalui pelatihan pemanfaatan bahan alami hutan menjadi produk tekstil ramah lingkungan bernilai ekonomi. Program ini diinisiasi untuk menjawab permasalahan keterbatasan keterampilan masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT), dalam mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>Ecoprint adalah teknik pewarnaan kain menggunakan daun, bunga, dan bagian tumbuhan lainnya tanpa bahan kimia berbahaya, sehingga aman bagi lingkungan dan selaras dengan prinsip konservasi. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis pembuatan produk, tetapi juga pembinaan kewirausahaan, pengemasan, dan pemasaran.</p>
		Pola Kemitraan Konservasi Berbasis Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Tahura Lati Petangis di Kabupaten Paser	pengelolaan kawasan konservasi Tahura Lati Petangis yang mengedepankan pola kemitraan antara pengelola kawasan dan masyarakat desa sekitar hutan. Sebagai bagian dari Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Tahura memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu melibatkan masyarakat secara aktif tanpa mengurangi daya dukung dan kualitas lingkungan.
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Gerakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Lokal	Inovasi GERAMI (Gerakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim) merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Paser. Perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca telah berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan dan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kehidupan masyarakat.
		Gerakan Menghilangkan Penampungan Sampah	Inovasi atau terobosan yang berupaya mengurangi ketergantungan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan peran bank sampah dan TPS3R, optimalisasi pengangkutan langsung terjadwal, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat.
		Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Inovasi ini menyelesaikan masalah terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH di Tanah Grogot Ibu Kota Kabupaten Paser adalah dengan Melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di Tanah Grogot tentang pentingnya RTH, cara merawat RTH, dan manfaat RTH bagi kehidupan serta Mengorganisir kegiatan gotong royong untuk membersihkan dan merawat RTH, yang melibatkan masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat pencinta lingkungan, pemanfaat/pemelihara RTH dalam Melaksanakan penanaman pohon peneduh dan perdu di median jalan protokol.
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Si Mandiri Mas Bro	merupakan inovasi daerah berupa aplikasi penilaian kinerja ASN yang dirancang untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja aparatur.
8.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	SIMPARDA	inovasi daerah berupa aplikasi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan data, promosi, dan pengembangan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif secara terintegrasi dan berbasis digital. Aplikasi ini menjadi platform



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			terpadu yang memuat informasi destinasi wisata, event daerah, produk ekonomi kreatif, pelaku usaha, serta layanan pendukung lainnya dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat, wisatawan, pelaku industri, dan pemerintah daerah.
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Strategi Pendataan Partisipatif Kolaboratif Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Paser “Sedap Bro Rutilahu”	Inovasi Pelaksanaan satu data Rutilahu sehingga bisa terarah dan tepat sasaran untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi penanganan Rutilahu di Kabupaten Paser.
		Layanan Cepat Pengajuan Pengukuran Peta Bidang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paser	Inovasi Pemerintah Kabupaten Paser yang bertujuan mempercepat proses pengajuan dan pengukuran peta bidang tanah milik pemerintah daerah, khususnya dalam rangka pengadaan tanah berskala kecil serta penataan dan pengamanan aset daerah berupa tanah.  Inovasi ini diwujudkan melalui penyusunan Pedoman Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanah oleh OPD kepada Pemerintah Daerah, sehingga tercipta mekanisme yang jelas, terstandar, dan terintegrasi dalam proses administrasi pengukuran dan pemetaan tanah
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Gerakan data Desa Terintegrasi menuju Desa Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Si Gadis Desa Cemara)	Inovasi atau terobosan untuk pengembangan sistem informasi desa terintegrasi dalam suatu aplikasi OpenSID yang akan digunakan oleh seluruh desa di Kabupaten Paser. Gerakan atau kegiatan ini adalah upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah desa berbasis teknologi informasi menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Pelayanan Desa yang Empatik, Efektif dan Berstandar (PD Yakin) di Kabupaten Paser	Inovasi yang merupakan tindakan nyata dan terukur guna terwujudnya pelayanan berkualitas dan merata kepada masyarakat. Pemerataan dan keseragaman pelayanan merupakan salah satu wujud pelaksanaan keadilan kepada seluruh warga.
		Satu Malam Bersama Desa (SALAM BERDESA)	Inovasi SALAM BERDESA Adalah Program Inovasi yang menekankan pada aksi Pembinaan Desa secara langsung bersama ke Desa-Desa, dengan melibatkan semua Bidang pada Dinas PMD Kabupaten Paser, dan juga melibatkan Camat sehingga Camat juga mengetahui kondisi desa yang dikunjungi dan diakhir akan ada berita acara hasil temuan dalam pembinaan tersebut yang ditandatangani oleh Dinas PMD, Camat dan Desa.
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Peran PEKKA Melalui Program KLIK PATUH di Kabupaten Paser	Inovasi yang berorientasi pada pemberdayaan Perempuan yang menyentuh Perempuan Kepala Keluarga dapat meningkatkan perannya dalam Pembangunan dan mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
		Menuju Keluarga Paser yang Berkualitas dengan KLIK BAPER Hotline WA Interaktif Bidan Paser	terobosan layanan konseling dan edukasi Keluarga Berencana (KB) berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana di Kabupaten Paser. Inovasi ini hadir sebagai penguatan penggerakan lini lapangan melalui optimalisasi peran Penyuluh KB (PKB)/PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), serta bidan sebagai ujung tombak pelayanan KB. KLIK BAPER memanfaatkan platform WhatsApp dengan fitur Auto Respon interaktif sebagai media konsultasi cepat, edukatif, dan mudah diakses oleh Pasangan Usia Subur (PUS)
12.	Dinas Perhubungan	Mekanisme Pengelolaan Data Prioritas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada	Membuat regulasi Pengelolaan Data Prioritas Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Dinas Perhubungan Kabupaten Paser	sehingga Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser selain memiliki pedoman pengelolaan data, tetapi juga memiliki data prioritas yang selama ini tidak tersedia.
13.	Kecamatan Kuaro	PETISI MANTAP "Pengembangan Kompetensi Non Klasikal dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai"	Inovasi yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi yang harus dipenuhi oleh ASN di Kantor Kecamatan Kuaro, melalui pola pengembangan kompetensi non klasikal menggunakan metode coaching, mentoring dan belajar mandiri (self learning), dimana reformer memiliki peran di bidang administrasi kepegawaian dan kediklatan. Dengan adanya aksi perubahan ini, diharapkan kesenjangan kompetensi pegawai dapat diminimalisir, sehingga dengan pegawai yang semakin kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan memberikan dampak terhadap perbaikan pelayanan maupun kinerja organisasi.
14.	Kecamatan Batu Sopang	Early Service Adminduk dengan Kemitraan Fasyankes dan Layanan Praktek Mandiri di Wilayah Kecamatan batu Sopang Kabupaten Paser Tahaun 20224 (Program ELSA)	Program ELSA (Early Service Adminduk) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Dengan adanya kemitraan antara fasilitas kesehatan (fasyankes) dan layanan praktik mandiri, diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran dan pemenuhan hak masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
15.	Kecamatan Long Kali	AMAN LUR (Ayo Makan Telur)	AMAN LUR (Ayo Makan Telur) merupakan inovasi Kecamatan Long Kali dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi peran Camat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan. Inovasi ini menggerakkan kolaborasi lintas sektor, termasuk TPPS desa/kelurahan dan dukungan pihak swasta, untuk memastikan pemberian telur sebagai sumber



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			protein hewani kepada balita risiko stunting tepat sasaran. Melalui mekanisme distribusi telur secara langsung (door to door) disertai edukasi gizi kepada keluarga balita, program ini bertujuan meningkatkan asupan protein anak, memperkuat koordinasi TPPS, serta mengefektifkan intervensi penanganan stunting di wilayah Kecamatan Long Kali.
16.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemberdayaan Petani Milenial untuk Regenerasi Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Paser	Pemberdayaan Petani Milenial Untuk Regenerasi Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Paser Petani milenial adalah generasi petani yang mengadopsi teknologi modern dan metode pertanian berkelanjutan. Mereka sering menggunakan media sosial untuk berbagi praktik terbaik dan menjangkau pasar. Dengan pendekatan inovatif, mereka berusaha meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam pertanian, serta mendorong kesadaran tentang pentingnya makanan sehat dan lokal.
		Fasilitasi Kios Pangan pada BUMDes untuk Kemudahan Akses Pangan di Kabupaten Paser	Inovasi Fasilitasi Kios Pangan pada BUMDes merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam memperkuat ketahanan dan stabilitas pangan melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia pangan yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
17.	Dinas Perikanan	Gerakan Makan Ikan Mencegah Stunting (GEMAKAN CATING)	Gerakan Makan Ikan adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan konsumsi ikan di masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk mempromosikan ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang kaya akan nutrisi, seperti omega-3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin. Kualitas tumbuh kembang bayi pada 1000 hari pertama kelahiran (HPK) sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon dan asupan nutrisi yang tepat.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
18.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Percepatan Penyelesaian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Paser	Percepatan penyelesaian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan. Dengan menerapkan pedoman yang jelas dan standar yang konsisten, OPD dapat menyusun laporan keuangan secara lebih cepat dan terstruktur. Hal ini juga melibatkan pelatihan staf, penggunaan teknologi informasi, serta pemantauan berkala untuk memastikan semua data terkumpul tepat waktu. Hasilnya, laporan yang disusun akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah
		Efisiensi Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Penambahan Fitur Arus Kas Daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Paser	Inovasi ini merupakan optimalisasi monitoring arus kas daerah melalui penambahan fitur pada aplikasi arus kas daerah adalah dalam rangka meningkatkan kinerja pelaporan dan penatausahaan keuangan daerah, untuk meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan, dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat. Hal ini berkontribusi pada pengambilan keputusan dan penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
19.	Badan Pendapatan Daerah	Peningkatan Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Melalui Implementasi Chatbot AI WhatsApp (PENTAS PETANG ICA)	Program Komputer yang dirancang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memahami dan merespons pertanyaan dan perintah menjawab pertanyaan, membantu menyelesaikan masalah dan memberikan informasi produk. Dengan mengotomatiskan tugas dan memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat.
		Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Tata Kelola Pelayanan Jemput Bola	Optimalisasi Pajak Daerah melalui Tata Kelola Pelayanan Jemput Bola dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan melakukan pendataan, edukasi, pembinaan,



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			serta pelayanan langsung ke lokasi objek pajak.
		GERILYA PAJAK	<p>Inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha calon Wajib Pajak Jasa Parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Inovasi ini dilakukan melalui pendekatan proaktif dan jemput bola dengan melakukan pendataan langsung, sosialisasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha jasa parkir di wilayah Kabupaten Paser.</p> <p>Dalam jangka pendek, Gerilya Pajak bertujuan mendorong pendaftaran calon Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak aktif. Pada jangka menengah, inovasi ini menghasilkan basis data potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir yang akurat sebagai dasar perencanaan dan proyeksi pendapatan daerah. Sementara dalam jangka panjang, Gerilya Pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBJT Jasa Parkir secara signifikan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.</p>
20.	Dinas Sosial	Sistem Anak Berhadapan Dengan Hukum	Inovasi untuk menyelesaikan masalah anak berhadapan dengan hukum melalui langkah-langkah yang termuat dalam "Sistem Anak Berhadapan Dengan Hukum".
		Penanganan Adopsi Anak Melalui Kader Sosial Berbasis Masyarakat (SI Kasim)	SI KASIM adalah merupakan gerakan Penanganan Adopsi Anak Melalui Kader Sosial Berbasis Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan kepedulian terhadap Adopsi Anak antar Warga Negara Indonesia yang bertujuan untuk membantu para Calon Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung dalam mengatasi masalah pengambilan keputusan Penetapan Calon Anak Angkat.
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Optimalisasi Sistem Informasi Data Tunggal Pelaku UMKM	Untuk mengatasi permasalahan data UMKM di Kabupaten Paser, reformer akan melakukan optimalisasi system pendataan UMKM (SIDATA UMKM) melalui : Bimbingan Teknis / Pelatihan pendamping



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			UMKM, Sosialisasi, Pembuatan pedoman teknis (SOP) dan pembuatan instrumen
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Unggul Untuk Koperasi yang Adaptif	Inovasi ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi agar mampu menghadapi dinamika perubahan lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan berbasis digital. Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan manajerial, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inovasi produk, serta penguatan tata kelola organisasi. Dengan SDM yang unggul dan adaptif, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja, memperluas peluang usaha, serta merespons tantangan ekonomi secara lebih cepat dan tepat.
22.	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang	Sistem Perencanaan dan Pengadaan Efisien Alat Kesehatan, Bahan Medis dan Obat-Obatan	Gagasan dari Inovasi ini didasari oleh adanya permasalahan dalam Kelengkapan dan Persediaan (stok) akan Alat kesehatan (ALKES), Bahan Medis dan Obat-obatan yang tidak sesuai dengan Kebutuhan dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Kerang. Untuk mencapai ketersediaan stok barang tersebut diatas yang sesuai dengan kebutuhan sebagai Upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan bagi Masyarakat, maka dibutuhkan suatu Penguatan "Sistem Perencanaan dan Pengadaan Efisien ALKES, Bahan Medis habis pakai dan Obat-obatan" (SppEAKMO)
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Strategi Percepatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Tata Ruang	Strategi pada Inovasi ini adalah: Mempercepat pelayanan pertimbangan teknis tata ruang. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di internal Bidang Tata Ruang yang dapat menangani pelayanan pertimbangan teknis tata ruang.
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Melalui Peningkatan Pengawasan	Inovasi ini merupakan upaya Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengawasan	yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diaktualisasikan dengan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas personel perangkat daerah penyelenggara jasa konstruksi.
		Kolaborasi Pengawasan Perizinan Melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air (Monalisa) Kabupaten Paser	Inovasi pembentukan Tim MONALISA yang akan menjadi platform kolaboratif antar pemangku kepentingan dari berbagai sektor sehingga dapat memudahkan dalam koordinasi dan evaluasi pada pengendalian Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air.
		Pengendalian Banjir Melalui Pilot Project Normalisasi Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat (Uwok Danum)	Inovasi ini nanti berbentuk pelaksanaan pekerjaan normalisasi/pemeliharaan dan rehabilitasi drainase perkotaan yang dimana dalam mewujudkannya di butuhkan kolaborasi antara reformer dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan stakeholder terkait penanganan banjir serta dukungan masyarakat, karena mulai dari pengidentifikasian sampai dengan pengimplementasian di butuhnya kerjasama terutama dukungan dari masyarakat sekitar karena penentuan berhasil tidaknya tetap masyarakat di sekitar terdampak banjir yang nanti untuk bisa terlibat secara langsung dengan fasilitasi dari pemerintah.
24.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Strategi Perluasan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Paser	Inovasi Strategi Perluasan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Paser merupakan inisiatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam mendorong terciptanya pasar kerja yang inklusif dan berkeadilan. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan terencana, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan pasar.



PEMERINTAH  
KABUPATEN PASER

PaserMAS  
*Olo Manin Aso Buen Si Olo 'Ndo*



# RLPPD

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

---